

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESIAPAN
PEMERINTAHAN DAERAH DALAM IMPLEMENTASI
PP 71 TAHUN 2010**
(Studi Empiris : Kabupaten Nias Selatan)



Oleh:

HETTI HERLINA
2010/57720

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESIAPAN
PEMERINTAHAN DAERAH DALAM IMPLEMENTASI
PP 71 TAHUN 2010
(Studi Empiris : Kabupaten Nias Selatan)**

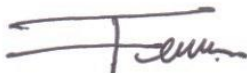
HETTI HERLINA

2010/57720

**Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode
September 2013 dan telah disetujui/diperiksa oleh kedua pembimbing.**

Padang, Juli 2013

Pembimbing I



Fefri Indra Arza, SE., M.Sc. Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

Pembimbing II



Erly Mulyani, SE, M.Si. Ak
NIP. 19781204 200801 2 011

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESIAPAN
PEMERINTAHAN DAERAH DALAM IMPLEMENTASI
PP 71 TAHUN 2010**

(Studi Empiris pada Kabupaten Nias Selatan)

Hetti Herlina

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan pemerintahan daerah Kab. Nias Selatan dalam implementasi PP 71 tahun 2010. Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat eksploratif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis faktor dan studi kasus, hasil analisis data menunjukkan bahwa kesiapan Pemda Kabupaten Nias Selatan dalam mengimplementasikan PP 71 tahun 2010 dipengaruhi oleh faktor informasi, faktor perilaku dan faktor keterampilan. Saran dalam penelitian ini adalah (1). bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan dalam implementasi PP 71 tahun 2010. (2). Saran untuk peneliti selanjutnya dapat lebih mengembangkan dan memperluas lingkup penelitian.

Kata kunci : PP 71 tahun 2010, kesiapan implementasi, faktor yang mempengaruhi, metode kualitatif, analisis faktor.

ABSTRACT

This research has purposed to know and analysis the factors that influence the readiness of the territory government in South Nias'regency to implement PP 71 year 2010. The kind of this research is eksplorative research. Technique that used in collecting the data is the questions and interview. Technique that used in analyzing the data in factor analisys and case study to show that the readiness of the territory government in South Nias'regency to implement PP 71 year 2010 has influenced by information factors , behavioral factors and factors skill.suggestion in this study (1). To government in South Nias'regency consider the factors that affect readiness in implement PP 71 year 2010. (2). For further research to be develop and expand the scope of research.

Key words : PP 71 year 2010, Implementation readiness, the Influence factors, Eksploration method, Factor analysis

PENDAHULUAN

Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual sebagai pengganti PP No. 24 Tahun 2005 yang menggunakan basis kas menuju akrual diharapkan dapat memberikan landasan penerapan akuntansi pemerintahan yang lebih baik. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas kinerja, transparansi, dan akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah di Indonesia.

Pada pernyataan standar akuntansi pemerintahan/PSAP (2010) diungkapkan jangka waktu kewajiban bagi pemerintahan daerah untuk mengimplementasikan PP 71 ini adalah empat tahun setelah peraturan pemerintah ini diterbitkan yaitu pada tahun 2014, akan tetapi ada kemungkinan sebagian besar pemerintahan daerah masih belum siap untuk mengimplementasikan PP 71 tahun 2010 atau akuntansi berbasis akrual penuh. Fenomena ini berdasarkan indeks hasil pemeriksaan sementara (IHPS) semester I tahun 2012 oleh BPK, masih banyak laporan keuangan Pemerintah daerah (LKPD) yang memperoleh opini tidak wajar (*adverse*) dan tidak memberikan pendapat (TMP).

Tiga tahun setelah PP 71 diterbitkan, seharusnya kota dan kabupaten di Indonesia telah siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual ini. kesiapan ini dapat dinilai dari opini laporan keuangan pemerintahan daerah (LKPD) yang diperoleh pemda, jika dengan penerapan sistem akuntansi berbasis kas menuju akrual LKPD kabupaten/ kota telah dapat memperoleh opini WTP, maka dapat diasumsikan kewajibannya untuk menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual penuh pada tahun 2014 tidak akan menghadapi kendala yang berarti. Akan tetapi masih ada LKPD kabupaten/kota yang memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP), salah satunya adalah Kab. Nias Selatan, sejak tahun 2006 sampai tahun 2012 opini laporan keuangannya adalah Tidak Memberikan Pendapat /TMP (IHPS:2012), padahal penyusunan LKPD masih berpedoman pada PP 24 tahun 2005 yaitu

menggunakan standar akuntansi berbasis kas menuju akrual.

Armenakis et al. dalam (Wiyono:2008) mendefinisikan kesiapan (*readiness*) sebagai penanda kognitif terhadap perilaku dari penolakan atau dukungan terhadap upaya perubahan. Sedangkan definisi kesiapan untuk berubah yang dikemukakan oleh Holt et al. dalam (Wiyono:2008) adalah sikap komprehensif yang mempengaruhi secara berkelanjutan oleh isi (contoh: apa yang sedang berubah), proses (contoh: bagaimana perubahan diimplementasikan), konteks (contoh: keadaan yang berada pada saat perubahan terjadi), dan individu (contoh: karakteristik dari mereka yang diminta untuk berubah) melibatkan dan secara kolektif merefleksikan keluasan terhadap individu atau sekumpulan individu sebagai kenaikan secara kognitif dan secara emosional untuk menerima, menyetujui, dan mengadopsi sebuah rencana khusus yang bermaksud untuk mengubah *status quo*.

Fokus kajian penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan pemda dalam implementasi kebijakan. Kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah PP 71 tahun 2010. Teori yang dijadikan acuan untuk mengkaji faktor-faktor ini adalah teori kesiapan yang dikemukakan oleh Holt et al., jika dikaitkan ke dalam penelitian maka : (1).Isi adalah perubahan sistem akuntansi dari sistem akuntansi berbasis kas menuju akrual (PP 24 tahun 2005) menjadi sistem akuntansi berbasis akrual penuh (PP 71 tahun 2010), penelitian ini tidak membahas sistem akuntansi ini, karena yang diteliti adalah faktor yang mempengaruhi kesiapan Pemda, bukan kesiapan sistem akuntansi tersebut, (2). Proses dapat dilihat dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. (3). Konteks mengacu pada keadaan saat perubahan terjadi, penilaian terhadap konteks ini memperhatikan situasi sosial dari objek penelitian pada saat sistem akuntansi berbasis akrual diimplementasikan. Karena penelitian ini dilakukan pada saat objek penelitian belum menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual, maka penilaian terhadap konteks ini belum dapat

dilakukan. (4). Individu, penilaiannya dilihat dari karakteristik mereka yang diminta untuk berubah. Untuk itu akan ada kajian mengenai perilaku partisipan penelitian diantaranya adalah komitmen dan resistensi partisipan terhadap implementasi PP 71 tahun 2010 ini. Dari uraian diatas, maka fokus kajian penelitian ini adalah proses dan individu.

Dalam setiap implementasi suatu kebijakan akan ada kendala atau tantangan yang akan dihadapi. Menurut Binsar (2010), Beberapa tantangan dalam implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah kompleksitas implementasi akuntansi berbasis akrual memerlukan sistem akuntansi dan IT *based system* yang lebih rumit. lemahnya Komitmen pimpinan, kebutuhan akan SDM yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan, adanya resistensi terhadap perubahan dari pihak internal instansi pemerintahan.

TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN MASALAH

A. Kesiapan Pemda dalam Implementasi PP 71 Tahun 2010

Armenakis et al. dalam (Wiyono:2008) mendefinisikan kesiapan (*readiness*) sebagai penanda kognitif terhadap perilaku dari penolakan atau dukungan terhadap upaya perubahan. Sedangkan definisi kesiapan untuk berubah yang dikemukakan oleh Holt et al. dalam (Wiyono:2008) adalah

Sikap komprehensif yang mempengaruhi secara berkelanjutan oleh isi (contoh: apa yang sedang berubah), proses (contoh: bagaimana perubahan diimplementasikan), konteks (contoh: keadaan yang berada pada saat perubahan terjadi), dan individu (contoh: karakteristik dari mereka yang diminta untuk berubah) melibatkan dan secara kolektif merefleksikan keluasan terhadap individu atau sekumpulan individu sebagai kenaikan secara kognitif dan secara emosional untuk menerima, menyetujui, dan mengadopsi sebuah rencana khusus yang bermaksud untuk mengubah *status quo*.

1. Isi (apa yang sedang berubah)

Perubahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perubahan sistem akuntansi dari sistem akuntansi berbasis kas menuju akrual (PP 24 tahun 2005) menjadi sistem akuntansi berbasis akrual penuh (PP 71 tahun 2010).

Menurut Sutana (2011) Basis akrual penuh adalah Menyangkut atas pengakuan dampak-dampak keuangan atas transaksi dan kejadian dalam suatu periode dimana terjadinya, tanpa memperhatikan ada atau tidaknya kas yang diterima dan dibayarkan. Basis akrual penuh melaporkan sumber daya ekonomi atau potensi jasa (*aset*) dan kewajiban (*liabilities*) suatu entitas, dan perubahannya. Ini membutuhkan kapitalisasi atas pengeluaran atas akuisisi semua *capital asset* dan depresiasi atas aset tersebut sebagai konsumsi atas potensi jasanya.

2. Proses (bagaimana perubahan diimplementasikan)

Mazmanian dan Sabatier dalam (Wahab:1991) mendefinisikan Implementasi sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang akan diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya. Proses ini akan berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata---baik yang dikehendaki atau yang tidak--- dari output tersebut, dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya-upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan)

terhadap undang-undang/peraturan yang bersangkutan.

3. Individu (karakteristik dari mereka yang diminta untuk berubah).

a. Komitmen pimpinan

Robbins (2000) mengemukakan sikap atau perilaku anggota organisasi pada umumnya dipengaruhi oleh sistem nilai dan yang dianut dalam organisasi dan dipengaruhi pula oleh perilaku pemimpinnya.

Dimensi komitmen pimpinan yang dikemukakan Allen dan Mayer dalam (Sangadji:2009) yaitu :

- a) Komitmen efektif yaitu tingkat seberapa jauh seorang pimpinan secara emosi terikat, mengenal dan terlibat dalam organisasi.
- b) Komitmen berkelanjutan yaitu suatu penilaian terhadap biaya yang terkait dengan meninggalkan organisasi.
- c) Komitmen normatif merujuk kepada tingkat seberapa jauh seseorang secara *psychology* terkait untuk menjadi bagian dari organisasi yang didasarkan pada perasaan seperti kesetiaan, affeksi, kepemilikan, kebanggaan dan lain-lain.

b. Resistensi terhadap Perubahan

Yudo mendefinisikan resistensi terhadap perubahan sebagai kecenderungan bagi pekerja untuk tidak ingin berjalan seiring dengan perubahan organisasi, baik oleh ketakutan individual atas sesuatu yang tidak diketahui atau kesulitan organisasional.

Robbins dalam (Wibowo:2006) menyebutkan ada lima faktor yang menjadikan resistensi individual dan enam faktor resistensi Organisational dengan rincian sebagai berikut.

1) *Habits* (Kebiasaan)

Hidup ini sangat kompleks, tetapi tidak selalu memerlukan pertimbangan yang berbelit-belit, jika mendasarkan diri pada kebiasaan saja, akan tetapi, bila dihadapkan pada perubahan, maka

kecenderungan merespons cara-cara yang sudah biasa akan menjadi sumber resistensi.

2) *Security* (keamanan)

Suatu perubahan akan mempengaruhi perasaan keamanan. Terutama bagi orang-orang yang sangat memerlukan jaminan keamanan. Orang yang kinerjanya rendah dan tidak kompetitif cenderung menolak perubahan. Mereka khawatir perubahan dapat menimbulkan ketidakpastian dan berdampak negatif terhadap kelangsungan masa depannya.

3) *Fear of The Unknown* (Ketakutan atas ketidaktahuan)

Perubahan dapat mengakibatkan perpindahan dari unit kerja yang satu ke unit kerja yang lain, dari suatu sistem yang sudah dikenal ke sistem baru yang belum dikenal. Hal tersebut menyebabkan ketidakpastian karena menukar dari yang sudah diketahui kesesuatu yang belum dikenal sehingga mengakibatkan kekhawatiran dan ketidakamanan.

4) *Selective Information Processing* (Proses Informasi Selektif)

Individu membentuk dunianya melalui persepsinya. Sekali dibangun kemapanan maka, akan menentang perubahan. Mereka mendengar apa yang ingin mereka dengar. Mereka mengabaikan informasi yang menentang dunia yang telah mereka bangun.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi suatu Kebijakan.

Menurut Edwar dalam (Abdalla:2010) ada empat variabel baik langsung atau tidak langsung yang mempengaruhi proses implementasi yaitu :

1. Komunikasi

Persyaratan utama bagi komunikasi kebijakan yang efektif adalah para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang mereka kerjakan, hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.

2. Disposisi

Disposisi atau sikap adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis, karena sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan.

3. Sumber Daya manusia

Menurut Wibowo (2007) kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya.

4. Struktur Birokrasi

Rourke dalam (Nurbarani:2009) mendefinisikan birokrasi sebagai sistem administrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yang terstruktur dalam sistem hirarki yang jelas, dilakukan dengan aturan tertulis (*written procedures*), dilakukan oleh bagian tertentu yang terpisah dengan bagian lainnya, oleh orang-orang yang dipilih karena kemampuan dan keahlian di bidangnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan metode kuantitatif Model kualitatif yang digunakan adalah studi kasus instrumental (*instrumental case study*). Herdiansyah (2012) mengemukakan studi kasus instrumental merupakan studi kasus untuk alasan eksternal, bukan karena ingin mengetahui hakekat kasus tersebut. Kasus hanya dijadikan sarana untuk memahami hal lain diluar kasus seperti untuk membuktikan suatu teori yang sebelumnya sudah ada. Sedangkan metode kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis faktor, Arikunto (2010) menyatakan analisis faktor dapat dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor faktor dengan skor total, sesudah terlebih dahulu mengetahui kekhususan tiap faktor.

OBJEK PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Pemda Kab. Nias Selatan memiliki 15 satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Responden Penelitian

Responden penelitian ini adalah pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi di SKPD yaitu pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (PPK-SKPD) beserta dua orang pegawai/staf yang membantunya yang tersebar di 15 satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dan adapun pemilihan partisipan didasarkan pada teknik *stratified random sampling* yaitu teknik yang digunakan untuk memilih sampel/partisipan yang dalam populasinya terdiri atas tingkatan-tingkatan atau strata. Dalam setiap strata, nantinya akan dipilih sampel/partisipan secara random.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner.

Teknik Analisa Data

Untuk menganalisis data, dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan *Miles and Huberman* (Herdiansyah:2012) yang meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dan analisis factor dengan tahapan sebagai berikut (1). menilai apakah semua sub-variabel atau item atau indikator pembentuk faktor layak untuk diikutkan pada analisis faktor atau tidak (2). item-item yang tidak layak untuk difaktorkan, maka dilakukan faktoring atau mereduksi item dengan jalan sub-variabel, yang tidak layak difaktorkan dikeluarkan dari analisis factor. (3). setelah faktornya terbentuk, maka dapat dilakukan analisis data lanjutan dengan menggunakan nilai skor faktor (SF).

Hasil dan Pembahasan

Dari hasil analisis data yang dilakukan berdasarkan temuan penelitian di lapangan maka dapat dilakukan pembahasan sebagai berikut :

1. Faktor informasi

Faktor informasi memiliki nilai *factor loading* tinggi, artinya informasi memiliki korelasi yang kuat sebagai faktor yang mempengaruhi kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi sistem akuntansi basis akrual.

Jika dilihat dari item yang menjadi pembentuk faktor informasi maka, ditemukan banyak kelemahan yaitu belum pernah ada sosialisasi tentang sistem akuntansi basis akrual kepada pegawai bagian keuangan di semua SKPD. Belum dilakukan sosialisasi ini karena Perda (peraturan daerah) tentang sistem akuntansi basis akrual ini belum diterbitkan. Belum adanya sosialisasi ini juga menyebabkan 89,2% responden mengetahui tentang sistem akuntansi basis akrual dari peneliti, ketidaktahuan ini dikarenakan penempatan pegawai dalam suatu posisi jabatan sebagian besar tidak didasarkan pada kompetensi pendidikannya. Uraian di atas mengidentifikasi bahwa pegawai bagian keuangan SKPD sebagai implementator belum memahami dan belum memiliki kompetensi untuk menerapkan sistem akuntansi basis akrual ini. Sehingga kompetensi SDM menjadi kendala utama dalam penerapan sistem akuntansi basis akrual. dan pernyataan ini didukung oleh jawaban responden yang menginginkan prioritas strategi utama untuk mengimplementasikan sistem akuntansi basis akrual adalah meningkatkan kompetensi SDM dengan pelatihan SDM dan mengadakan perangkat lunak (*IT based System*).

2. Faktor Perilaku

Faktor perilaku memiliki *factor loading* yang tinggi, artinya perilaku memiliki korelasi yang kuat sebagai faktor yang mempengaruhi kesiapan pemda dalam implementasi sistem akuntansi basis akrual.

Jika dilihat dari item yang menjadi pembentuk dari faktor perilaku maka ditemukan

banyak kelemahan yaitu belum pernah ada pembahasan mengenai tentang rencana atau langkah-langkah yang akan dilakukan untuk penerapan akuntansi basis akrual kepada pegawai bagian keuangan di semua SKPD. jika pembahasan mengenai rencana atau langkah-langkah yang akan dilakukan untuk penerapan sistem akuntansi basis akrual ini belum dilakukan maka kemungkinan terjadinya resistensi terhadap perubahan dalam penerapan sistem akuntansi basis akrual ini akan tinggi. Penolakan terhadap perubahan ini tidak ditunjukkan oleh pegawai SKPD dengan menolak untuk bekerja sesuai dengan perubahan sistem baru, akan tetapi penolakan ini kemungkinan ditunjukkan oleh keengganan dari pegawai bagian keuangan sebagai implementator untuk menyesuaikan diri dan kompetensinya dengan tuntutan perubahan sistem tersebut. Jika demikian maka implementasi untuk sistem akuntansi basis akrual akan berjalan tidak baik.

3. Faktor Keterampilan

Faktor keterampilan memiliki nilai *factor loading* tinggi, artinya keterampilan memiliki korelasi yang kuat sebagai faktor yang mempengaruhi kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi sistem akuntansi basis akrual.

Jika dilihat dari item yang menjadi pembentuk faktor keterampilan maka, ditemukan kelemahan yaitu pegawai bagian keuangan SKPD belum pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan mengenai sistem akuntansi basis akrual. seharusnya untuk dapat mengimplementasikan sistem akuntansi basis akrual pada tahun 2014, pegawai bagian keuangan ini telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Jadi dapat disimpulkan bahwa keterampilan pegawai bagian keuangan SKPD sebagai implementator dalam perubahan sistem akuntansi ini belum siap untuk implementasi sistem akuntansi basis akrual ini di tahun 2014.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Kesimpulan yang didapat dari “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan Pemda dalam implementasi PP 71 tahun 2010” adalah :

1. Dari keseluruhan item yang dianalisis dihasilkan tiga faktor yang mempengaruhi kesiapan Pemda dalam implementasi sistem akuntansi basis akrual yaitu :
 - a. informasi
 - b. Perilaku
 - c. Keterampilan
2. Dari 3 faktor yang mempengaruhi kesiapan Pemda tersebut merupakan ekstraksi dari 16 item pernyataan yang merupakan bagian dari 5 variabel yang mempengaruhi kesiapan Pemda dalam Implementasi sistem akuntansi basis akrual yaitu komunikasi, kompetensi SDM, struktur birokrasi, komitmen pimpinan dan resistensi terhadap perubahan. 3 faktor tersebut dapat menjelaskan item-item yang mempengaruhi kesiapan pemda dalam implementasi sistem akuntansi basis akrual sebesar 62,542% sedangkan sisanya sebesar 37,458% dipengaruhi oleh item lain dari variabel di atas yang tidak termasuk ke dalam model.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan dari hasil penelitian diatas dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias Selatan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan :
 - a. Untuk melakukan sosialisasi sistem akuntansi basis akrual kepada seluruh SKPD
 - b. Pimpinan SKPD sudah harus mulai membahas langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mengatasi kendala yang akan dihadapi pada penerapan sistem akuntansi basis akrual.
 - c. Melakukan perekrutan atau penerimaan pegawai dengan mempertimbangkan

tingkat dan latar belakang pendidikan khususnya yang berkaitan dengan lingkup tugas pengelolaan keuangan daerah,

- d. Menempatkan pegawai pada posisi atau lingkup tugas yang sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing sehingga dapat lebih memahami dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya.
 - e. Memberikan pendidikan dan pelatihan mengenai proses penyusunan laporan keuangan dengan sistem akuntansi basis akrual kepada pegawai bagian keuangan.
2. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan supaya dapat lebih mengembangkan dan memperluas lingkup penelitian sehingga dapat lebih mengungkap fenomena yang terjadi di pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah, serta dapat membantu memberikan strategi dan solusi kepada pemerintah dalam menghadapi kendala dan hambatan pelaksanaan tugas.

DAFTAR PUSTAKA

Abdorrhakman Gintings. (2009). “ Hakekat Perubahan dalam Konteks Perilaku Organisasi”. ([www.mebermutu.org/.../HAKEKAT%20PERUBA... -](http://www.mebermutu.org/.../HAKEKAT%20PERUBA...)). {3 Januari 2013}.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia(2012), *Indeks Hasil Pemeriksaan Sementara Semester 2*. Jakarta. (<http://www.bpk.go.id/web/files/2012/10/LHP-sem1-12.pdf>). {12 Desember 2012}.

Binsar H Simanjuntak. (2010). “Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua Di Sektor Pemerintahan Di Indonesia”. *Makalah Kongres IAI XI*, Jakarta (www.iaiglobal.or.id/tentang_iai_download.php?..). {4 April 2013}.

Etta Mamang Sangadji.(2009)”Pengaruh Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasional Pimpinan terhadap Kepuasan Kerja dan Dampaknya pada Kinerja”. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. (jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/paedagoqia/.../82) {3 Januari 2013}.

Haedar Akib. (2010). “Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana.” *Jurnal Administrasi Publik* Volume I No 1. (<http://haedarakib.files.wordpress.com/2011/03/implementasi-kebijakan.pdf>). [7 Januari 2013]

Hafiz, Abdul Tanjung. (2012). *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrua*. Bandung:Alfabeta.

Hair, J.F., Anderson, R.E., Tatham, R.L. and Black, W.C. (2006). *Multivariate Data Analysis, Sixth Edition*, Prentice Hall International: UK

Herdiansyah, Haris. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Salemba Humanika

I Wayan Sutana. (2011). “Government Financial Reporting International Current Issues and Practices (Isu-isu Terkini dan Praktek-praktek Pelaporan Keuangan Pemerintah)”. (<http://little-economist.blogspot.com/2011/03/government-financial-reporting.html>). [3 Januari 2013]

Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2011). *Anggaran pendapatan dan Belanja pemerintah daerah (APBD) 2011*. Jakarta. (<http://www.djpk.depkeu.go.id/>). {2 Desember 2012}.

Kieso, Donald E. Et al. (2005). *Akuntansi Intermediate, Edisi Kesepuluh, jilid 1*. (Emil Salim. Terjemahan 2006). Jakarta: Penertbit Erlangga.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2005). *Peraturan pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta.

Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (2006). *Memorandum Pembahasan Penerapan Basis Akrua dalam Akuntansi Pemerintah di Indonesia*. Jakarta. (<http://www.ksap.org/memorandum.pdf>). {2 Desember 2012}

Martoyo, Susilo. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPF.

Myrna Nurbarani. (2009).” Reformasi Birokrasi Pemerintahan Surakarta” *Tesis dipublikasikan*. PPs Universitas Diponegoro. (http://eprints.undip.ac.id/24269/1/MYRNA_NURBARANI.pdf). {5 Januari 2013}.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun (2010), *Standar Akuntansi Pemerintahan (Berbasis Akrua)*

Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta.

Taufik Umar Abdalla. (2010). “Analisis Kesiapan Administrasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009” *Skripsi. Dipublikasikan*. Universitas Indonesia.

(lontar.ui.ac.id/file?...%20Analisis%20kesiapan%20...).
{12 Januari 2013}

Wahab, Solichin Abdul. (1991). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wiyono, Adrianto Sugiarto. 2008. “Hubungan Kepemimpinan dengan Kesiapan Implementasi Knowledge Management dalam Organisasi”.
Jurnal

(<http://rianadrianto.files.wordpress.com/2008/06/kep-emimpinan-dan-kesiapan-km.pdf>). {6 Januari 2013}.

Wibowo. (2006). *Manajemen Perubahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wibowo. (2007). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

U. Yudo Osmoro. (2009). “Mengenal dan Memahami Resistensi dalam Perubahan”.
(<http://Yudoosmoro.files.wordpress.com/2009/08/mengenal-dan-memahami-resistensi.pdf>). {6 Januari 2013}.